

ABTRACT

Enforcement of criminal laws against corruption has become a primary focus for many countries in their efforts to eradicate rampant corrupt practices. Indonesia and Singapore, two countries in Southeast Asia, adopt different approaches in the enforcement of anti-corruption laws. This research aims to conduct a comparative analysis of the enforcement of anti-corruption criminal laws in Indonesia and Singapore using a normative approach to evaluate the criteria for successful prosecution of corruption. This approach encompasses aspects such as the quality of laws, effectiveness of law enforcement agencies, compliance with the law, and the level of disclosure and prosecution of corruption cases. The research methodology employed is a comparative descriptive analysis, gathering secondary data from various sources, including laws, research reports, and official documents related to the enforcement of anti-corruption laws in both countries. The analysis is conducted by comparing the legal frameworks, enforcement processes, and outcomes of anti-corruption law enforcement in Indonesia and Singapore. The research findings reveal significant differences between Indonesia and Singapore in the enforcement of anti-corruption criminal laws. Singapore demonstrates a stricter legal framework, more effective law enforcement agencies, higher compliance with the law, and better disclosure and prosecution rates of corruption cases compared to Indonesia. The implications of these findings underscore the importance of the quality of laws, effectiveness of law enforcement agencies, and compliance with the law in determining the success of enforcement of anti-corruption criminal laws.

Keywords: Comparative Law, Enforcement, Criminal Offense, Corruption

ABSTRAK

Penegakan hukum pidana korupsi menjadi fokus utama bagi banyak negara dalam upaya memberantas praktik korupsi yang merajalela. Indonesia dan Singapura, dua negara di Asia Tenggara, memiliki pendekatan yang berbeda dalam penegakan hukum korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis perbandingan antara penegakan hukum pidana korupsi di Indonesia dan Singapura dengan menggunakan pendekatan normatif untuk mengevaluasi kriteria keberhasilan dalam penindakan korupsi. Pendekatan ini mencakup aspek-aspek seperti kualitas undang-undang, efektivitas lembaga penegak hukum, kepatuhan terhadap hukum, serta tingkat pengungkapan dan penuntutan kasus korupsi. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif komparatif dengan mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber, termasuk undang-undang, laporan penelitian, dan dokumen resmi terkait penegakan hukum korupsi di kedua negara. Analisis ini dilakukan dengan membandingkan kerangka hukum, proses penegakan hukum, dan hasil-hasil penegakan hukum korupsi di Indonesia dan Singapura. Hasil penelitian menunjukkan perbedaan signifikan antara Indonesia dan Singapura dalam penegakan hukum pidana korupsi. Singapura memiliki kerangka hukum yang lebih ketat, lembaga penegak hukum yang lebih efektif, tingkat kepatuhan terhadap hukum yang lebih tinggi, serta tingkat pengungkapan dan penuntutan kasus korupsi yang lebih baik dibandingkan dengan Indonesia. Implikasi dari temuan ini adalah pentingnya kualitas undang-undang, efektivitas lembaga penegak hukum, dan tingkat kepatuhan terhadap hukum dalam menentukan keberhasilan penegakan hukum pidana korupsi.

Kata Kunci: Perbandingan Hukum, Penegakan, Tindak Pidana, Korupsi